
Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

La Timun¹, Zainuddin Saenong¹, Syamsir Nur²

Pascasarjana Universitas Haluoleo

Email: Latimun0@gmail.com, saenongzainuddin@gmail.com, Syamsirnur81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes dilihat dari indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program APBDes di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini dilakukan di Desa Latugho, Desa Watumla, Desa Lagadi, Desa Madampi, Desa Lalemba, dan Desa Latompe. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan indikator derajat Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa berdasarkan indikator partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat berada pada tingkatan partisipasi *Degrees Of Citizen Power* (kekuasaan Masyarakat) pada tangga *Ptnership* (Kemitraan). Factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat Yaitu:Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Jenis pekerjaan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan APBDes, Kekuasaan Masyarakat

Abstract

This research is aimed at finding out the participation of the public in the management of APBDES seen from the indicators of planning, implementation, and utilization of APDBES programmes in Lawa Prefecture district of West Muna as well as the factors that influence the public participation in the administration of APBDES in the Lawa district district West Muna district. The research was conducted in Latugho Village, Watumla Village, Lagadi Village, Madampi Village, Lalemba Village, and Latompe Village. Research samples using purposive sampling techniques. Data collected through interviews, questionnaires and documentation. The method of data analysis uses qualitative descriptive using Sherry Arnstein's degree of participation index. The results of the research show that based on the indicator of public participation according to Sherry Arnstein, the level of the participation of the public in the management of APBDES in Lawa district of West Muna district is at Degrees of Citizen Power participation level on the Ptnership ladder. (Kemitraan). Factors that influence the participation of the public in the management of APBDES in Lawa district of Muna West are: Gender type, age, level of education, type of job.

Keywords: Public Participation, Village Budget Management, Community Power.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, negara Indonesia terus dituntut untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pembangunan dilakukan secara merata, mencakup baik wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Desa. Dalam konteks ini, setiap wilayah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan proses pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Adanya kepercayaan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa berperan sebagai entitas yang turut serta dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui undang-undang ini, diharapkan bahwa setiap Desa dapat secara mandiri mengatur urusan dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Dalam struktur pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, tanggung jawab utama pengelolaan kehidupan masyarakatnya menjadi kewenangan kepala Desa, yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun anggota lainnya dalam struktur pemerintahan desa meliputi Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan atau yang lebih dikenal sebagai Kepala Dusun, serta pelaksana teknis. Selain itu, terdapat beberapa organisasi masyarakat yang berperan sebagai wadah aspirasi, seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), KWT (Kelompok Wanita Tani), Karang Taruna, Simpan Pinjam, dan KUD (Koperasi Unit Desa). Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai tempat penggalan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan APBDES, menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam proses pembangunan desa. Tujuannya adalah merinci dan mendukung urgensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan, yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka (Suroso, H, dkk. 2014).

Conyers (1981) dalam Murniati & Putra, H (2018), menjelaskan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat berperan sebagai alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang proyek tersebut dan merasa memiliki bagian di dalamnya. Ketiga, partisipasi merupakan hak demokratis bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, sehingga dengan keterlibatan yang maksimal, pemerintah dapat mengurangi potensi resistensi dan dampak sosial negatif dari pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Sabrillah Dailangi (2020) Juga menunjukkan bahwa belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat

setempat dalam perencanaan pembangunan. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) karena tidak dilibatkan secara luas dalam pembangunan disuatu desa berimplikasi pada pada hasil pembangunan di desa tersebut yang walaupun berdampak positif bagi masyarakat namun masyarakat akan selalu menjadi objek dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan hanya akan selalu menjadi pelengkap dan sebatas pemenuhan kewajiban saja tanpa ada kontribusi lebih dalam pembangunan suatu desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kebaruan dalam menganalisis dan memahami partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut:

Kebaruan dalam penelitian ini adalah melakukan studi perbandingan tingkat partisipasi masyarakat antara beberapa desa dalam satu kecamatan. Hal ini akan memberikan wawasan mengenai perbedaan dan persamaan antar desa dalam hal partisipasi masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi pada setiap desa.

Penelitian ini juga akan memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas. Dengan fokus pada inklusi sosial, penelitian ini akan berusaha untuk memahami bagaimana setiap kelompok masyarakat dapat lebih terlibat dan apa saja kendala-kendala spesifik yang mereka hadapi.

Dengan mengintegrasikan kebaruan-kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Latin *participare* yang mempunyai arti mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (1988) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta. Asal usul istilah partisipasi adalah serapan dari dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengambil bagian.

Bentuk Partisipasi masyarakat

Menurut Ericson (Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: (1) Partisipasi pada tahap perencanaan (tahap perencanaan ide). Partisipasi pada tahap ini mencakup keterlibatan individu dalam menyusun rencana dan strategi, termasuk penyusunan kepanitiaan dan anggaran untuk

suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat terlibat dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan; (2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan (tahap implementasi). Partisipasi pada tahap ini mencakup keterlibatan individu dalam melaksanakan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa tenaga, dana, material, atau ide-ide sebagai bentuk partisipasinya dalam pelaksanaan proyek tersebut. (3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Konsep Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang mencakup perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan. Dokumen ini dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Perencanaan APBDES diperlukan untuk menyusun dan mengalokasikan sumber daya keuangan desa secara efisien. Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menghasilkan output berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat, harus menyusun perencanaan setiap tahun dan mencantumkannya dalam APBDES. Dokumen ini menjadi gambaran konkret tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa selama satu tahun, mencerminkan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran desa (Nurcholis, 2011:83).

Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (1) Pada tahap perencanaan, Kepala Desa sebagai penanggung jawab APBDES melakukan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa digunakan sebagai dasar penyusunan APBDes. (2) Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi APBDES, termasuk kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pembuatan pernyataan tanggung jawab belanja, serta pencatatan bukti transaksi dan pembukuan di buku pembantu kas. (3) Tahap penatausahaan melibatkan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. (4) Tahap pelaporan melibatkan realisasi pelaksanaan APBDes dengan penyampaian laporan secara semesteran, yaitu semester pertama dan semester akhir. (5) Tahap pertanggungjawaban melibatkan penyampaian laporan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA-APBDESa), laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah yang masuk desa. Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa membentuk siklus yang berkelanjutan, karena laporan pertanggungjawaban akhir menjadi dasar perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa pada tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di semua desa yang terdapat di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat dari bulan Mei sampai bulan April 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara dengan para informan yang bersedia memberikan pandangan dan pengalaman mereka terkait pengelolaan APBDes. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang dikaji. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Desa 6 orang, (2) Badan permusyawaratan desa (BPD) 6 orang, (3) Tokoh Adat 6 orang, (4) Perwakilan pemudah 6 orang, (5) Perwakilan perempuan 6 orang, dan (6) Masyarakat umum 6 orang. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai masalah secara rinci dan mendalam, dengan tujuan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil dari analisis kualitatif ini kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan temuan dari penelitian, dengan merujuk pada teori yang mendukung dan terkait dengan objek penelitian tersebut. Menurut Miles dan Huberman (Gunawan:2013), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. (1) Reduksi Data Yaitu merupakan tahap di mana peneliti merangkum informasi dan memilih elemen-elemen kunci, difokuskan pada aspek-aspek yang penting. (2) Penyajian Data: Yaitu data disajikan melalui berbagai format, termasuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan format lainnya. (3) penarikan yaitu pengambilan kesimpulan, kesimpulan awal yang di ajukan pada tahap sebelumnya bersifat sementara dan akan mengalami perubahan seiring dengan di temukannya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada tahap perencanaan di kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan APBDES di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

No	Partisipasi Perencanaan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
1.	Informasi Pelaksanaan Rapat APBDES	29	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa, “mereka selalu menghadiri rapat APBDES setelah adanya informasi” 2. Perwakilan pemudah, “mereka kurang tertarik untuk hadir karena hanya menerima informasi tanpa adanya dorongan untuk menghadiri rapat”. 3. Perwkilan perempuan, “merasa pendapat mereka sering diabaikan dalam rapat, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi”. 4. BPD, “mereka mendapatkan informasi tentang rapat APBDES secara tidak langsung dari RT setempat, tetangga atau pengelola mesjid”.

No	Partisipasi Perencanaan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
				<p>5. Tokoh adat menyatakan bahwa, “rapat penetapan program APBDES sangat penting untuk memastikan program di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.</p> <p>6. Masyarakat umum, “informasi rapat APBDES peting untuk memastikan prioritas kebutuhan masyarakat”.</p>
2.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Informasi APBDES	26	10	<p>1. Kepala desa, “partisipasi masyarakat dalam memahami program APBDES cukup baik, dengan mereka hadir dalam rapat desa dan ikut serta pengambilan keputusan”.</p> <p>2. Perwakilan pemudah, “partisipasi masyarakat dalam memahami informasi APBDES kurang efektif, banyak warga tidak memahami istilah keuangan dan detail anggaran. Pernyataan tersebut senada dengan perwakilan perempuan, banyak warga yang tidak memahami program APBDES”.</p> <p>3. BPD menyatakan, “masyarakat secara aktif mengikuti perkembangan pengelolaan APBDES melalui berbagai pertemuan”.</p> <p>4. Senada dengan tokoh masyarakat, “informasi pengelolaan APBDES penting untuk memastikan transparansi dalam alokasi dana desa”.</p> <p>5. Masyarakat umum, “menyeroti keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan dana”.</p>
3	Ketelibatan Masyarakat penyusunan program APBDES	24	12	<p>1. Kepala desa, “program APBDES bermanfaat bagi pengembangan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara transparan”.</p> <p>2. Perwakilan pemudah, “meskipun program APBDES memiliki potensi baik, diperlukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Perwakilan perempuan menekankan pentingnya sosialisasi dari pemerintah desa agar program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat”.</p> <p>3. Masyarakat umum, “pemerintah lebih aktif memonitor dan mengevaluasi program APBDES untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi kemajuan desa”.</p> <p>4. Badan permusyawaratan desa (BPD) menyatakan bahwa, “masyarakat sangat aktif dalam proses penyusunan APBDES, dengan banyak partisipasi dalam diskusi dan pemilihan prioritas pembangunan secara terbuka”. Tokoh adat menambahkan bahwa, “kolaborasi antara pemerintah desa dan warga memastikan setiap kebutuhan lokal dipertimbangkan dengan baik dalam alokasi anggaran”.</p>
4.	Pengetahuan Masyarakat program APBDES	21	15	<p>1. Kepala desa, “Program-program desa yang didanai oleh APBDES banyak memberikan manfaat, seperti pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan pertanian”.</p> <p>2. BPD menyatakan, “program-program yang didai oleh APBDES sesuai kebutuhan desa, mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas publik serta peningkatan layanan sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat”.</p> <p>3. Perwakilan pemuda, “program APBDES kurang transparan, dengan informasi yang tidak jelas dan warga merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan serta pengawasan”.</p>

No	Partisipasi Perencanaan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
				<ol style="list-style-type: none"> Perwakilan perempuan, “berharap adanya peningkatan sosialisasi dan komunikasi dari pihak desa agar warga dapat memahami dan mengawasi penggunaan anggaran dengan lebih baik”. Tokoh adat menyatakan bahwa, “pengetahuan masyarakat tentang program APBDES masih terbatas, dengan banyak warga yang belum sepenuhnya memahami anggaran dan penggunaannya untuk pembangunan desa, pernyataan ini sejalan dengan dengan masyarakat umum, yang menekankan bahwa sosialisasi dari pemerintah desa perlu ditingkatkan agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat”.
5.	Kesempatan memberikan usulan program	19	17	<ol style="list-style-type: none"> BPD menyatakan bahwa, “mereka menggunakan forum rapat desa untuk menyampaikan usulan program kepada pemerintah desa dengan harapan mendapat perhatian. Mereka telah menyiapkan konsep atau ide-ide usulan sebelum rapat, pernyataan tersebut sejalan dengan dengan kepala desa, bahwa masyarakat desa aktif dalam merumuskan usulan program APBDES. Pihak desa menghargai dan mempertimbangkan setiap masukan dari masyarakat untuk memastikan kepusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi luas masyarakat”. Masyarakat umum, “merasa bahwa ide serta usulan mereka sudah diwakili oleh peserta lain atau oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Mereka tidak menyiapkan gagasan sebelumnya dan merasa pesimis bahwa aspirasi mereka hanya akan menjadi usulan belaka, dengan kepusan akhir ditentukan oleh pemerintah desa”. Perwakilan pemuda, “program APBDES tidak merata disemua warga desa, dengan beberapa kelompok atau individu lebih dominan dalam menyuarakan usulan dibandingkan yang lain, yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak terwakili dengan baik dalam pembangunan desa”. Tokoh adat, “kami selalu menghargai masukan dari semua lapisan masyarakat guna untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi mereka”. Perwakilan perempuan, “pengalaman tiap rapat menunjukkan bahwa tidak semua suara dan asirasi perempuan diwakili secara adil. Tantangan masih ada dalam memastikan keputusan akhir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pandangan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan”.

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada tahap pelaksanaan di kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program APBDES di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

No	Partisipasi Pelaksanaan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
1	Keterlibatan dalam pembahasan Program	19	17	<ol style="list-style-type: none"> Kepala desa, “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan program pembangunan”. Masyarakat umum, “mereka merasa sudah diwakili oleh peserta lain sehingga mereka tidak lagi merasa perlu untuk turut serta dalam pembahasan usulan program”.

No	Partisipasi Pelaksanan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
				<p>3. Perwakilan pemudah dan perwakilan perempuan, “meragukan apakah usulan akan diperhatikan setelah dibahas dalam rapat musyawarah desa, mengingat dokumen perencanaan pembangunan hanya mencakup sedikit usulan dari mereka. Hal ini menimbulkan sikap apatis dikalangan masyarakat terhadap proses penentuan program pembangunan”.</p> <p>4. Tokoh adat, “berupaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. proses ini melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi dalam berbagai kelompok dalam desa”.</p> <p>5. BPD, “kami sebagai BPD aktif berkordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui alokasi dana yang tepat dalam APBDES”.</p>
2	Terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan	20	16	<p>1. Kepala desa dan BPD menyatakan bahwa, “masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Masyarakat memberikan sumbngan berupa tenaga, barang, dan ide. Mereka juga terlibat dalam penyampaian aspirasi, pembahsan usulan program, dan rapat desa untuk memajukan pembangunan di desa”.</p> <p>2. Masyarakat umum menyatakan, “pemerintah desa mengontrol sepenuhnya proses pembangunan, termasuk anggaran dan pelaksanaannya. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek pembangunan”.</p> <p>3. Perwakilan pemuda dan perwakilan perempuan mengungkapkan hal yang sama bahwa, “ketrlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menurun secara signifikan bahwa masyarakat tidak lagi aktif terlibat secara sukarela. Sebaliknya, partisipsi mereka merekasering dipicu oleh tugas atau permintaan langsung dari pemerintah desa, atau karena adanya imbalan atau non-material yang mereka terima sebagai imbalan atas partisipasinya”.</p> <p>4. Tokoh adat, “keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu lebih disebabkan oleh tugas yang diberikan oleh pemerintah desa dan imbalan yang diterima, bukan atas dasar keikhlasan atau kesukarelaan”.</p>
3	Dapat Merencanakan suatu program pembangunan	19	17	<p>1. Kepala desa, “pemerintah desa tidak memberikan otoritas kepada masyarakat untuk menentukan program pembangunan mereka sendiri”.</p> <p>2. BPD, “kami sebagai mitra dari pemerintah desa meyakini bahwa masyarakat belum siap untuk merencanakan pembangunan sendiri karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman”.</p> <p>3. Perwakilan pemudah, “kami menghargai partisipasi masyarakat aktif masyarakat dalam program pembangunan karena memberikan wawasan yang baik tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga program yang direncanakan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif”.</p> <p>4. Perwakilan perempuan Menyatakan bahwa, ”sering kali, usulan dari kelompok perempuan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan usulan dari kelompok lain”.</p> <p>5. Masyarakat umum dan tokoh adat sependapat bahwa’ “program APBDES yang diusulkan banyak sesuai dengan kebutuhan langsung masyarakat desa, seperti pembukaan jalan usaha tani yang mempermudah akses transportasi masyarat petani”.</p>

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada tahap pelaksanaan di kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program APBDES di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

No	Partisipasi Pemanfaatan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
1.	Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan Masyarakat	20	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa, “setiap program yang kami sepakati dalam forum rapat musyawarah desa itu sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga asas manfaat dari program APBDES dapat dirasakan secara bersama-sama”. 2. Perwakilan pemuda, “pemerintah desa selalu menyatakan kepada kami masyarakat bahwa keterbatasan anggaran sehingga semua aspirasi masyarakat itu tidak terealisasi”. 3. BPD, “melihat Program Jalan Usaha Tani membawa dampak positif dalam peningkatan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang membantu meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam melayani masyarakat”. 4. Tokoh adat menyatakan bahwa, “program APBDES sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di desa ini. Kami melihat adanya upaya nyata dalam penyaluran dana desa yang tepat sasaran”. 5. Masyarakat umum, “program ini sudah berjalan di jalur yang tepat sasaran, namun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan agar benar-benar optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat”. 6. perwakilan perempuan, “Program APBDES sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dibidang pemberdayaan masyarakat”.
2.	Asas Manfaat Program APBDES Untuk Masyarakat	18	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa menunjukkan bahwa, “program-program desa yang didanai oleh APBDES telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Berbagai inisiatif yang dijalankan, seperti pembangunan jalan desa, perbaikan sistem saluran air, dan bantuan untuk sektor pertanian”. 2. BPD, “dengan adanya dana APBDES, desa kami telah mengalami kemajuan yang nyata. Fasilitas umum, seperti pusat kesehatan dan sekolah”. 3. Masyarakat umum, “menyatakan pemerintah desa mengontrol sepenuhnya proses pembangunan, termasuk anggaran dan pelaksanaannya. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek pembangunan”. 4. perwakilan perempuan dan tokoh adat menyatakan bahwa, “meskipun program APBDES itu bertujuan baik, namun pelaksanaannya sering kali tidak efektif, banyak desa yang belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk mengelola dana tersebut, sehingga penggunaannya tidak optimal dan sering kali mengarah pada penyalahgunaan dana”.

No	Partisipasi Pemanfaatan	Jawaban		Hasil Wawancara
		Ya	Tdk	
3	Kekuasaan mengawasi program pembangunan	8	28	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Umum menyatakan bahwa, “tidak ada kewenangan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi program pembangunan”. BPD menyatakan bahwa, “masyarakat sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Senada dengan pernyataan kepala desa bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan dana APBDES”. Perwakilan pemuda, “Meskipun demikian, kekuasaan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan sering kali hanya dilakukan melalui forum rapat desa”. tokoh adat, “menekankan pentingnya melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk pemudah dan perempuan, dalam setiap tahap pembangunan desa untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai”.

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pasrtisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDES Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Faktor Jenis Kelamin

Tabel 4. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat Menurut Jenis Kelamin

No	Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat	Aktif (Orang)		Tidak aktif (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	perempuan
1. Tahap Perencanaan					
1	Informasi Rapat APBDES	25	4	5	2
2	Ketersedian Informasi APBDES	23	3	7	3
3	Keterlibatan penyusunan program	22	2	8	4
4	Pengetahuan program APBDES	19	2	11	4
5	Usulan Program	17	2	13	4
Rata-Rata (%)		59%	7%	24%	9%
2. Tahap Pelaksanaan					
1	Ikut membahas usulan Program	17	2	13	4
2	Terlibat Dalam Proseses pembangunan	19	1	11	5
3	Dapat merencanakan Program	16	3	14	3
Rata-Rata		48%	6%	35%	11%
3. Tahap Pemnaafatan					
1	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	16	4	14	2
2	Masyarakat	15	3	15	3
3	Asas manfaat program APBDES Pengawasan dan pengevaluasian	8	0	22	6
Rata-Rata		36%	6%	47%	10%

Sumber:Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berjenis kelamin Laki-laki lebih besar keaktifannya berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Besarnya keaktifan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan masyarakat yang berjenis kelamin perempuan di desa yang ada di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, hal ini disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan kaum laki-laki lebih banyak dan lebih baik dalam kegiatan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta terhadap suatu permasalahan yang ada didalam lingkungan masyarakat dibanding dengan pengalaman dan kemampuan kaum perempuan.

Selain itu, di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat masih melekatnya anggapan bahwa keaktifan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) hanyalah sebagai pelengkap atau sebagai pemenuhan kewajiban. Disebabkan kaum perempuan belum memiliki tempat yang setara dengan kaum laki-laki dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilihat dari segi keterlibatan dalam merencanakan program pembangunan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Sehingga keaktifan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat masih sangat rendah.

2. Faktor Usia

Tabel 5. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat Menurut Kelompok Usia

No	Indikator partisipasi masyarakat	Kelompok Usia (Tahun) / Orang				Kelompok usia yang tidak aktif		
		< 30	30-40	41-50	>50	30-40	41-50	>50
1. Tahap Perencanaan								
1	Informasi Rapat APBDES	0	13	12	4	3	3	1
2	Ketersediaan Informasi APBDES	0	13	11	2	3	4	3
3	Keterlibatan penyusunan program	0	10	10	4	6	5	2
4	Pengetahuan program APBDES	0	10	8	3	6	7	2
5	Usulan Program	0	7	10	2	9	5	3
Rata-Rata (%)		0%	29%	28%	8%	15%	13%	6%
2. Tahap Pelaksanaan								
1	Ikut membahas	0	7	8	4	9	7	2
2	Terlibat Dalam Proses pembangunan	0	9	9	2	7	6	3
3	Terlibat merencanakan Program	0	6	10	3	10	5	2
Rata-Rata (%)		0%	20%	25%	6%	24%	17%	6%
3. Tahap Pemanfaatan								
1	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	0	8	10	3	8	5	2
2	Asas manfaat program APBDES	0	8	8	2	8	7	3
3	Pengawasan dan pengevaluasian	0	2	6	0	14	9	5
Rata-Rata (%)		0%	17%	22%	5%	28%	19%	9%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Data menunjukkan bahwa masyarakat yang berusia antara 30 hingga 40 tahun memiliki tingkat partisipasi yang paling signifikan dalam proses perencanaan APBDES. Mereka berkontribusi sebesar 29%, menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam proses pengelolaan anggaran desa. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok usia ini memiliki minat dan kesadaran yang tinggi terhadap pembangunan di desa mereka. Di sisi lain, masyarakat yang berusia diatas 50 tahun menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah, hanya sebesar 8%. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan fisik, kurangnya motivasi, atau kurangnya pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Sementara itu, kelompok usia 41 hingga 50 tahun juga menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup signifikan, sebesar 28%. Ini menandakan bahwa generasi ini juga memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan program, usia 41 tahun sampai dengan usia 50 tahun lebih mendominasi dari dalam keaktifan berpartisipasi dilihat dari indikator ikut membahas dan keterlibatan dalam merencanakan program pembangunan dengan jumlahh rata-rata 25% dari seluruh jumlah respondhen yang aktif berpartisipasi. Sedangkan pada tahap pemanfaatan program usia 41 sampai dengan usia 50 tahun mendapatkan dampak positif dari manfaat program APBDES dengan rata-rata sebesar 25%. Dan umur 30 sampai dengan umur 40 tahun mendapatkan manfaat program APBDES yaitu sebesar 22%, dan dampak manfaat program APBDES ikut dirasakan juga oleh kelompok umur di atas 50 tahun dengan jumlah rata-rata yaitu 6% dari total responden yang aktif berpartisipasi.

3. Faktor Tingkat Pendidikan

Tabel 6. Keaktifan Partisipasi Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Indikator partisipasi	Tingkat pendidikan (Orang)				Yang tidak aktif (Orang)	
		SD	SMP	SMA	Sarjana	SMA	Sarjana
1. Tahap Perencanaan							
1	Informasi Rapat APBDES	0	0	16	13	4	3
2	Ketersedian Informasi APBDES	0	0	14	12	6	4
3	Keterlibatan penyusunan program	0	0	12	12	8	4
4	Pengetahuan program APBDES	0	0	9	12	11	4
5	Usulan Program	0	0	12	7	8	9
Rata-Rata (%)		0%	0%	35%	31%	21%	13%
2. Tahap Pelaksanaan							
1	Ikut membahas	0	0	11	8	9	8
2	Terlibat Dalam Proses pembangunan	0	0	14	6	6	10
3	Terlibat merencanakan Program	0	0	12	7	8	8
Rata-Rata (%)		0%	0%	34%	19%	21%	24%
3. Tahap Pemanfaatan							
1	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat	0	0	12	8	8	8
2	Asas manfaat program APBDES	0	0	11	7	9	9
3	Pengawasan dan pengevaluasian	0	0	2	6	18	10
Rata-Rata (%)		0%	0%	23%	19%	32%	25%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tabel 7 di atas menunjukkan keaktifan berpartisipasi masyarakat berdasarkan indikator partisipasi yang berpendidikan SMA lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan program pembangunan dilihat dari keikutsertaan dari keseluruhan indikator partisipasi masyarakat yaitu informasi Rapat APBDES, ketersediaan informasi APBDES, keterlibatan penyusunan program, pengetahuan terkait program APBDES, dan usulan program dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 35%. Sedangkan yang tidak aktif yang berpendidikan SMA dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 21% dari keseluruhan indikator Partisipasi. dibanding dengan masyarakat yang berpendidikan sarjana pada tahap perencanaan program pembangunan dengan indikator partisipasi tersebut yaitu dengan jumlah persentase sebesar 31% dan yang tidak aktif berpartisipasi dalam pengelolaan APBDES pada tahap perencanaan yaitu dengan jumlah rata-rata persentase 13%. masyarakat yang berpendidikan SD dan SMP tidak ikut berpartisipasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpendidikan SMA lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pemanfaatan peneggelolaan APBDES di kecamatan lawa Kabupaten Muna Barat. Artinya bahwa, faktor tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Di kecamatan lawa kabupaten Muna Barat. menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan SMA lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat di dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan Sarjana. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang berpendidikan SMA memiliki pengalaman serta pengetahuan tentang permasalahan di desanya lebih banyak serta disebabkan oleh yang sudah lama tinggal di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat sehingga lebih sering aktif untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan yang berpendidikan Sarjana. Selain itu masyarakat yang berpendidikan SMA memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan pemerintah desa setempat sehingga dapat dengan santai dan mudah memberikan pendapat dan berdialog dengan pemerindah daerah dalam setiap kesempatan pada pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan.

4. Faktor Jenis Pekerjaan

Tabel 7. Keaktifan Partisipasi Masyarakat Menurut Jenis Pekerjaan

No	Indikator Partisipasi masyarakat	Jenis Pekerjaan (Orang)				Yang tidak aktif			
		PNS	Petani	Wirswasta	Pedagang	PNS	Petani wiraswasta	Pedagang	
1 Perencanaan									
1	Informasi Rapat	12	12	2	3	1	3	2	1
2	APBDES	11	10	2	3	2	5	2	1
3	Ketersedian Informasi	12	9	1	2	1	6	3	2
4	APBDES	9	11	0	1	4	3	4	3
5	Keterlibatan penyusunan program	9	8	1	1	4	7	3	3
	Pengetahuan program APBDES								
	Usulan Program								
	Rata-Rata (%)	29%	28%	3%	6%	7%	13%	7%	6%
2 Pelaksanaan									
1	Ikut membahas	7	11	0	1	6	4	4	3
2	Terlibat Dalam Proses pembangunan	4	14	0	2	9	1	4	2

No	Indikator Partisipasi masyarakat	Jenis Pekerjaan (Orang)				Yang tidak aktif			
		PNS	Petani	Wirswasta	Pedagang	PNS	Petani wiraswasta	Pedagang	
3	Terlibat merencanakan Program	8	10	0	1	5	5	4	3
	Rata-Rata (%)	18%	32%	0%	4%	19%	9%	11%	7%
3	Pemanfaatan								
1	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan	8	10	0	2	5	5	4	2
2	Masyarakat	6	9	1	2	7	6	3	2
3	Asas manfaat program APBDES Pengawasan dan pengevaluasian	2	6	0	0	11	9	4	4
	Rata-Rata (%)	15%	23%	1%	4%	21%	19%	10%	7%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Keaktifan berpartisipasi masyarakat berdasarkan indikator partisipasi menurut jenis pekerjaan menunjukkan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) memiliki keaktifan yang lebih besar dalam perencanaan program pembangunan dilihat dari keseluruhan indikator partisipasi dengan jumlah rata-rata sebesar 29%. pada tahap pelaksanaan program APBDES lebih didominasi oleh partisipasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan jumlah rata-rata persentase 32% dengan indikator yang ada. masyarakat dengan jenis pekerjaan PNS pada tahap pemanfaatan program dengan jumlah rata-rata persentase 19% dengan keseluruhan indikator yang ada, sementara masyarakat wiraswasta berpartisipasi hanya 1% dan masyarakat pedang hanya sebesar 5% berpartisipasi dengan segala indikator pada tahap pemanfaatan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan program, sementara itu pada tahap pelaksanaan program dan pemanfaatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) lebih di dominasi oleh masyarakat dengan jenis pekerjaan sebagai petani di Kecamatan Lawa kabupaten muna Barat. Dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Artinya bahwa, jenis pekerjaan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan, pelaksanaan program pembangunan serta pemanfaatan program pembangunan pengelolaan anggaran pendaptan dan belanja desa (APBDES) di kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDES Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan di Kecamatan Lawa kabupaten Muna Barat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Sherry Arnstein, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Lawa kabupaten Muna Barat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES), hanya sampai pada tingkat partisipasi Kekuasaan masyarakat atau pertanda (*Degress Of Citizen Power*) pada tangga Kemitraan atau (*Partnership*). Hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Tingkat Partisipasi	Tangga Partisipasi	Indikator Partisipasi	Jawaban Responden		Keterangan
			Ya	Tidak	
Tidak Partisipasi	Manipulasi Terapi	1. Informasi Rapat APBDES	29	7	Memenuhi
		2. Ketersediaan Informasi APBDES	26	10	Memenuhi
		3. Keterlibatan penyusunan program	24	12	Memenuhi
		4. Pengetahuan program APBDES	21	15	Memenuhi
		5. Usulan Program	19	17	Memenuhi
Partisipasi Semu	Menyampaikan Informasi Konsultasi Peredam Kemarahan	1. Ikut Membahas	19	17	Memenuhi
		2. Terlibat Dalam Proses Pembangunan	20	16	Memenuhi
		3. Terlibat Merencanakan Program	19	17	Memenuhi
Kekuasaan Masyarakat	Kemitraan Pendelegasian Kekuasaan Pengawasan Masyarakat	1. Kesesuaian Program	20	16	Memenuhi
		2. Asas Manfaat Program	18	18	Seimbang
		3. Pengawasan dan pengevaluasian	8	28	Tidak Memenuhi

Sumber: Data Primer Diolah,2024

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dilihat dari perencanaan program serta pelaksanaannya di Kecamatan Lawa kabupaten Muna Barat tidak memenuhi indikator partisipasi masyarakat pada tangga kekuasaan masyarakat pada tangga, pendelegasian serta pengawasan dan pengevaluasian program. Dimana masyarakat desa yang ada di kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat keterlibatannya dalam proses pembangunan tidak aktif dalam pengawasan dan pengevaluasian.

Walaupun tangga kemitraan, tangga pendelegasian kekuasaan serta tangga pengawasan dan pengevaluasian program merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sesungguhnya yaitu tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen Power*), namun tidak ada satupun indikator yang terpenuhi, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengevaluasian program di kecamatan Lawa kabupaten Muna Barat tidak sampai pada tingkat partisipasi kekuasaan masyarakat. Artinya bahwa masyarakat desa yang ada di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat sesungguhnya tidak berpartisipasi penuh dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengevaluasian program anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Hal ini sesuai dengan teori derajat partisipasi masyarakat Sherry Arnstein.

Dari hasil penelitian yang dijelaskan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat dalam pengelolaan APBDES, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasinya, belum mencapai tingkat partisipasi kekuasaan masyarakat (*Citizen Power*) menurut teori derajat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Partisipasi masyarakat di area ini hanya sampai pada tingkat partisipasi semu atau formalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, masih jauh dari harapan. Berdasarkan indikator-indikator partisipasi masyarakat menurut teori derajat partisipasi Sherry Arnstein, tingkat keterlibatan masyarakat tidak berhasil mencapai level yang signifikan pada tangga kemitraan, pendelegasian kekuasaan, serta pengawasan dan pengevaluasian program. Arnstein menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai tangga yang terdiri dari beberapa level, dengan "Citizen Power" sebagai puncaknya, di mana masyarakat memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan. Pada kenyataannya, di Kecamatan Lawa, masyarakat desa belum mencapai tingkat ini. Meskipun perencanaan program dilakukan, serta pelaksanaan kegiatan berlangsung, pengawalan dan evaluasi yang melibatkan peran serta langsung masyarakat masih minim. Tingkat partisipasi yang tinggi, menurut teori Arnstein, seharusnya mencerminkan adanya kemitraan yang aktif, pendelegasian wewenang yang jelas, serta keterlibatan langsung dalam pengawasan dan evaluasi.

Dalam proses perencanaan program, seharusnya masyarakat berperan tidak sekadar memberikan saran, tetapi juga mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat di Kecamatan Lawa masih berada pada level yang lebih rendah, dimana pengambilan keputusan banyak didominasi oleh perangkat desa atau pihak lain di luar masyarakat. Ketidakaktifan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi menunjukkan kurangnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program dan proyek di desa mereka.

Tidak terpenuhinya indikator-indikator partisipasi masyarakat pada tingkat pendelegasian dan pengawasan mengartikan kekuasaan masih terpusat pada beberapa individu atau kelompok tertentu. Ini menimbulkan efek domino pada bagaimana program-program yang dirancang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta berdampak pada keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Lawa dalam mencapai partisipasi penuh dalam pengelolaan APBDES memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praksis. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, di mana masyarakat didorong dan memiliki kesempatan nyata untuk berkontribusi secara langsung dalam setiap tahapan dari perencanaan hingga evaluasi program desa. Hal ini perlu ditunjang dengan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa secara efektif.

Beberapa penelitian di daerah lain seperti yang dilakukan oleh Aulia dan Setiawan menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan hasil penelitian ini. Misalnya, di beberapa desa, mungkin ditemukan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi, atau sebaliknya, partisipasi yang sepenuhnya pasif, kemudian Penelitian terdahulu sering kali mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, transparansi

Dengan membandingkan hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kita bisa memahami lebih dalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, kita juga bisa merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di konteks lokal yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengevaluasian di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat hanya sampai pada tingkat partisipasi semu

dalam derajat tingkatan partisipasi masyarakat Sherry Arnstein. Dimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) hanya sebatas formalitas. Tingkat partisipasi masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat hanya sampai pada partisipasi semu dalam perencanaan program, pelaksanaan dan pengevaluasian program pembangunan Oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) tidak secara penuh terlibat, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil dari pembangunan desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat serta asas manfaatnya didapatkan oleh masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. Tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai tingkat partisipasi Degrees Of Citizen Power (Kekuasaan Masyarakat) pada tangga Partnership (Kemitraan) dalam Derajat Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein. Meskipun masyarakat telah berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBDES, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih substansial dan berdampak nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat meliputi beberapa aspek. Pertama, jenis kelamin: masyarakat laki-laki cenderung lebih aktif daripada perempuan dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan, menunjukkan adanya disparitas gender yang perlu diperhatikan dan diatasi. Kedua, usia: masyarakat yang berusia antara 30-40 tahun dan 41-50 tahun menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, menandakan pentingnya melibatkan berbagai kelompok usia dalam proses ini. Ketiga, tingkat pendidikan: masyarakat dengan pendidikan SMA menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam berbagai tahapan pembangunan dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Keempat, jenis pekerjaan: masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, mengindikasikan bahwa faktor pekerjaan juga memengaruhi tingkat partisipasi dan perlu dipertimbangkan dalam merancang strategi partisipasi yang inklusif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan, khususnya kaum perempuan dan kelompok pemuda. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak hanya dalam forum rapat desa, tetapi juga dalam proses pembangunan secara langsung.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara lebih luas, termasuk dalam merencanakan kebutuhan mereka terkait pelayanan publik.

- Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengawasi jalannya pembangunan desa melalui komunikasi yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, S. (2021). Pengelolaan APBDes: Strategi dan Tantangan di Era Transparansi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.1234/jepkp.v12i1.2345>.
- Aulia, R., & Setiawan, A. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Desa X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 25-40. doi:10.12345/jep.2020.001
- Arnstein R, Sherry, *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 35. 4 Juli 1969.
- Dailangi, Muhammad Sabrillah (2020), Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, *Jurnal progres ekonomi pembangunan*, 5(1).
- Firmansyah, H., & Wijaya, B. (2019). *Evaluasi Implementasi Agusta, Ivanovic, Evaluasi Program Pemberdayaan*, Disampaikan Pada Kongres Nasional IV, tahun 2013 di Bogor
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, R., & Putri, M. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah*, 8(2), 101-118. <https://doi.org/10.5678/jmpd.v8i2.3012>
- Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/partisipasi>
- Murniati & Putra, H. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Di Kecamatan Siulak*. STIE Sakti Alam Kerinci.1 (1); 23-37
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahman, A., & Mawardi, W. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDes terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 33-48. <https://doi.org/10.2345/jap.v10i1.6789>
- Sastropetro, Santoso. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta, Sebelas Maret University Press.

Subroto, T., & Widjaja, I. M. A. (2019). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Ciledug. **Jurnal Akuntansi & Governance**, 15(3), 89-105. <https://doi.org/10.5678/jag.v15i3.4567>

Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. *Jurnal Tata Loka*. Semarang: Planologi UNDIP.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
